



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366065 Fax. (0341) 325644

web : pemerintahan.malangkota.go.id e-mail : bag-pemerintahan@malangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adanya capaian yang tidak memenuhi target diharapkan dapat dicapai pada tahun berikutnya, dengan lebih meningkatkan upaya pencapaian terhadap Sasaran yang kurang berhasil. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.

Malang, 21 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,



Drs. WASTO, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610212 198303 1 025



BAB I - PENDAHULUAN

A

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- ✓ Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- ✓ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;



- o penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;
- o pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- o pelaksanaan tugas selaku pengelola Barang Milik Daerah;
- o pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
- o pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya

Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian adalah, sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya pelayanan administrasi terpadu tingkat Kecamatan (PATEN);
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan Lembaga dan dengan pihak swasta;
- d. Belum optimalnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di bidang hukum;
- e. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi khususnya dari komponen Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Kelembagaan serta Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- f. Belum optimalnya penerapan SAKIP;
- g. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang terintegrasi;



- h. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian daerah dan kinerja BUMD;
- i. Belum optimalnya penatausahaan aset milik daerah di lingkup Sekretariat Daerah;
- j. Belum optimalnya fungsi kehumasan dan protokoler;
- k. Belum optimalnya kualitas kesejahteraan rakyat dan kehidupan beragama;
- l. Belum optimalnya kualitas penyerapan anggaran akibat keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- m. Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah;
 - n. Belum optimalnya perumusan kebijakan yang ditindaklanjuti.

B. ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
 - Bagian Pemerintahan, terdiri dari
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Subbagian Otonomi dan Kerja Sama;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan:
 - Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perekonomian;
 - b. Subbagian Infrastruktur; dan



- c. Subbagian Sumber Daya Alam;
- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
 - Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
- Kelompok Jabatan Fungsional



BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Tujuan dan Sasaran

Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja.

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja	Nilai SAKIP Kota Malang			82	90,5	91	91,5	92
		Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	81	81,5	82	82,5	83
		Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	12,15	13	13,05	13,1	13,15
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	10%	20%	50%	75%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	96%	98%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	90,5	90,75	91	91,25



2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- ✚ Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik;
- ✚ Peningkatan dan pemantapan koordinasi baik dengan Pemerintah maupun dengan Perangkat Daerah lain;
- ✚ Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendayagunakan dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;
- ✚ Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- ✚ Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparatur PNS;
- ✚ Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- ✚ Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
- ✚ Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tata kerja yang jelas;
- ✚ Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;



- ✚ Peningkatan kerjasama, koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- ✚ Peningkatan dan pemantapan koordinasi antar perangkat daerah;
- ✚ Penyusunan produk hukum daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
- ✚ Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
- ✚ Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- ✚ Peningkatan kualitas sistem dan kinerja pelayanan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	81	81,5	82	82,5	83
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	12,15	13	13,05	13,1	13,15
4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	10%	20%	50%	75%	100%
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	96%	98%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	90,5	90,75	91	91,25



Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2019 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	80%	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.350.000.000,00
			Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.720.000.000,00
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	81	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 34.970.200.000,00
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	12,15	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 739.800.000,00
Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	10%	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 1.355.000.000,00
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	60%	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 3.930.000.000,00



BAB II SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	96%	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp. 820.000.000,00
			Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 10.125.000.000,00
			Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Rp. 565.000.000,00
			Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 2.553.345.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 1.457.830.000,00
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 13.614.306.500,00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 12.647.914.500,00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 4.550.597.000,00
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 4.319.360.000,00

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

110 Keatas	:	Sangat tercapai/ sangat berhasil
$90 \leq X < 110$:	Tercapai/Berhasil
$60 \leq X < 90$:	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$X < 60$:	Tidak tercapai/ Tidak terhasil



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2019

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	80%	99,37% (475/478)	124,2%	
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	81	83,92	103,6%	
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	12,15	11,5	94,6%	
4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	10%	13,79% (4 / 29)	137,9%	
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	60%	63,85 % (83 / 130)	106,4%	
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	96%	100% (45 / 45)	104,1%	
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	72,41	90,5%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 108,75 %



Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA						CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	85,71%	99,37%					124,2%				
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	80,63	83,92					103,6%				
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	10,2	11,5					94,6%				
Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	0%	13,7%					137,9%				
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	0%	63,8					106,4%				
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	93,48%	100%					104,1%				
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72,76	72,41					90,5%				

- ✓ Penjelasan Perbandingan realisasi tahun 2019 dengan realisasi tahun 2018 sebagai berikut :
 - Sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah dengan indikator persentase produk hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 85,71%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 99,37%
 - Sasaran layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 80,63, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 83,92



- Sasaran Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 10,2, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 11,5
- Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 0%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 13,79%
- Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan indikator Persentase ketercapaian IKK pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 0%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 63,85%
- Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan indikator Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 93,48%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 100%
- Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 72,76, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 72,41

✚ Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	100%	99,37%				
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	83	83,92				
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,15	11,5				
4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	100%	13,79%				
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	80%	63,85%				
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	100%	100%				
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	91,25	72,41				

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Standar Nasional	
				Target 2019	Realisasi 2019
1	2	2	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :



- a. Indikator Presentase produk hukum daerah dengan capaian kinerja 124,2% kategori sangat berhasil dari target yang ditetapkan 80% dapat terealisasi 99,37% (475 produk hukum yang telah ditetapkan dibanding 478 produk hukum yang diusulkan Perangkat Daerah);
- b. Indikator Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dengan capaian kinerja 103,6% kategori berhasil dari target yang telah ditetapkan 81 dapat terealisasi 83,92;
- c. Indikator Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP dengan capaian kinerja 94,60% kategori berhasil dari target yang telah ditetapkan 12,15 dapat terealisasi 11,5;
- d. Indikator Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan dengan capaian kinerja 137,9% kategori sangat berhasil dari target yang telah ditetapkan 10% dapat terealisasi 13,79%, (4 standar kompetensi yang telah diterapkan dibanding 29 standar kompetensi yang telah ditetapkan);
- e. Indikator Persentase ketercapaian IKK dengan capaian kinerja 106,4 kategori berhasil dari target yang telah ditetapkan 60% dapat terealisasi 63,85 (IKK yang telah tercapai sebanyak 83 dibanding seluruh IKK sebanyak 130);
- f. Persentase ketercapaian IKM dengan capaian kinerja 104,1 kategori berhasil dari target yang telah ditetapkan 96% dapat terealisasi 100% (45 Perangkat Daerah)
- g. Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 90,5% kategori berhasil dari target yang telah ditetapkan 30 dapat terealisasi 72,41;

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	80%	99,37%	124,2%	5.070.000.000	4.116.349.912	81,19%	152%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	81%	83,92	103,6%	34.970.200.000	34.275.987.000	98,01%	105%
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	12,15	11,5	94,6%	739.800.000	644.549.293	87,12%	108%
Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	10%	13,79%	137,9%	1.355.000.000	1.296.361.036	95,67%	144%
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	60%	63,85%	106,4%	3.930.000.000	3.322.614.588	84,54%	125%
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	96%	100%	104,1%	14.063.345.000	13.232.652.994	94,09	110%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	72,41	90,5%	36.590.008.000	30.067.605.152	82,17%	110%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- ✓ Indikator Persentase produk hukum daerah dengan capaian kinerja 124,2% dan capaian anggaran 81,19%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 18,81% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 52%
- ✓ Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 103,6% dan capaian anggaran 98,01%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 1,99% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5%
- ✓ Indikator Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP dengan capaian kinerja 94,6% dan capaian anggaran 87,12%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 12,88% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8%
- ✓ Indikator Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan dengan capaian kinerja 137,9% dan capaian anggaran 95,67%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 4,33% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 44%



- ✓ Indikator Persentase ketercapaian IKK dengan capaian kinerja 106,4 dan capaian anggaran 84,54%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 15,46% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25%
- ✓ Indikator Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik dengan capaian kinerja 104,1% dan capaian anggaran 94,09%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 5,91% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10%
- ✓ Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 90,5% dan capaian anggaran 82,17%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 17,83% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10%

✚ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Sasaran Tahun 2019 sudah tercapai sesuai dengan target, berbagai upaya telah dilakukan, dari 6 (enam) sasaran capaian tertinggi adalah sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, kedepan akan lebih meningkatkan capaian kinerja sasaran.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	124,2%	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	100%	94,20 %	94,20 %	
			Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	100,33 %	100,33%	
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	103,6%	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat	20 Fasilitas	20 Fasilitas	100%	
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	94,6%	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	137,9%	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	106,4%	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,13	2,794	89%	
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	104,1%	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	8 dokumen	8 dokumen	100%	
			Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	
			Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan PI yang difasilitasi	100%	100%	100%	
			Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,5%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	100%	100%	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	
				Persentase surat menyurat yang terdistribusi tepat waktu	100%	100,14%	100,14%	
				Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	
				Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	
				Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	100%	100%	



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

				Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	109,38%	109,38%	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan korsi yang difasilitasi	100%	64,78%	64,78%	
				Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	100%	100%	100%	
				Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	90%	50%	56%	
				Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	100%	100%	

Tabel 3.7

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan	262,44 %	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	63 orang	90%	
			Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	63 orang	90%	
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 Ranperda	21 ranperda	120%	
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Ranperwal, dan Rankepkda	Jumlah ranperwal, rankepkda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	30 ranperwal, 300 rankepkda	172 ranperwal, 360 rankepkda	262,44%	
			Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	3 Perda, 7 Perwal	3 Perda, 7 Perwal	100%	
Program Penerapan dan	Persentase sidang	100,33%	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan	1000 orang	954 orang	95%	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Penegakan Hukum	penegakan hukum daerah			Hukum				
			Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	600 orang	539 orang	89,83%	
			Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	4 dokumen	4 dokumen	100%	
			Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	11 sidang	100%	
			Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Jumlah peserta bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	62 orang	62 orang	100%	
			Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen	2 dokumen	100%	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 sidang	105 sidang	75%	
			Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	5000 buku	5.000 buku	100%	
			Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	900 orang	789 orang	88%	
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100%		Jumlah modin perawat jenazah memperoleh pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial keagamaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta safari ramadhan di 5 kecamatan	2000 orang	2000 orang	100%	
			Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	Jumlah peserta parade muharam	200 orang	200 orang	100%	
			Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	Jumlah peserta kegiatan hari santri	500 orang	500 orang	100%	
			Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi	2 Rekomendasi	4 rekomendasi	200%	
			Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta silaturahmi ulama dan umara	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah jamaah calon haji terfasilitasi transportasi daerah	1300 orang	1.300 orang	100%	
			Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah peserta pembinaan guru ngaji dan sekolah minggu	456 orang	456 orang	100%	
			Fasilitasi Keikutsertaan	Jumlah peserta fasilitasi	40 orang	40 orang	100%	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

			Pengembangan Tilawatil Quran	pengembangan tilawatil quran				
			Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta gebyar takbir idul fitri	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Jumlah peserta panjatan doa bersama	300 orang	300 orang	100%	
			Sosialisasi Wakaf	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Pembinaan Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	20 orang	20 orang	100%	
			Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Jumlah peserta rapat kerja tim pembina UKS	400 orang	400 orang	100%	
			Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Jumlah modin perawat jenazah memperoleh pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial keagamaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta safari ramadhan di 5 kecamatan	2000 orang	2000 orang	100%	
			Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	Jumlah peserta parade muharam	200 orang	200 orang	100%	
			Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	Jumlah peserta kegiatan hari santri	500 orang	500 orang	100%	
			Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi	2 Rekomendasi	4 rekomendasi	200%	
			Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta silaturahmi ulama dan umara	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah jamaah calon haji terfasilitasi transportasi daerah	1300 orang	1.300 orang	100%	
			Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah peserta pembinaan guru ngaji dan sekolah minggu	456 orang	456 orang	100%	



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

			Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta fasilitasi pengembangan tilawatil quran	40 orang	40 orang	100%	
			Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta gebyar takbir idul fitri	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Jumlah peserta panjatan doa bersama	300 orang	300 orang	100%	
			Sosialisasi Wakaf	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Pembinaan Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	100 orang	100%	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	20 orang	20 orang	100%	
			Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Jumlah peserta rapat kerja tim pembina UKS	400 orang	400 orang	100%	
Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Road Map dan hasil monev RB	2 dokumen	2 dokumen	100%	
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	5 Ranperwal	5 ranperwal	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Workshop Penyusunan SOP dan SP	Jumlah peserta workshop	230 orang	240 orang	104%	
			Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	15 ranperwal	15 ranperwal	100%	
			Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monev tugas perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	100%	



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

				perangkat daerah				
			Penyusunan/ Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	2 dokumen	2 dokumen	100%	
			Penyusunan/ Reviu Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan PI yang difasilitasi	100%	Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil rumusan kebijakan bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil rumusan kebijakan bidang PI	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program SDA	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PI	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	100%	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Jumlah dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan UMKM	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim pengandali inflasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	Jumlah pertemuan dan koordinasi	1 kali pertemuan, 2 kali koordinasi	1 kali pertemuan, 2 kali koordinasi	100%	
			Pembinaan badan usaha milik daerah	Jumlah BUMD yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	3 BUMD	3 BUMD	100%	
			Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah pertemuan tim TPKAD	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	100%	
			Penyusunan Draf Ranperwal PDAM	jumlah ranperda	1 ranperda	1 draft ranperda	100%	



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

			Penyusunan Draft Ranperwal RPH	jumlah ranperda	1 ranperda	1 draft ranperda	100%	
			Penyusunan Draft Ranperwal BPR	jumlah ranperda	1 ranperda	1 draft ranperda	100%	
Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	109,64%	Layanan Kehumasan	Jumlah layanan kehumasan	5 jenis layanan	5 jenis layanan	100%	
			Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang	603 kali tayang	110%	
			Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis	3 jenis	100%	
			Penerbitan majalah pemerintah kota	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar	18.000 eksemplar	100%	
			Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang	1.280 kali tayang	184,44%	
			Layanan Keprotokoleran	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan	1.318 layanan	146%	
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	89%	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	100%	
			Penyusunan LKPJ Walikota	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	2 dokumen	2 dokumen	100%	
			Penegasan Batas Wilayah	Jumlah dokumen pilar batas wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	2 dokumen	2 dokumen	100%	
			Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dimonitoring dan evaluasi	5 kecamatan dan 57 kelurahan	5 kecamatan dan 57 kelurahan	100%	
			Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	2 Dokumen	2 dokumen	100%	
			Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	10 MOU	18 MoU	180%	
			Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan	Jumlah desk pemilihan umum legislatif dan	1 pemilu legislatif, 1 pilpres dan	1 pemilu legislatif, 1 pilpres dan	100%	



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

			Pemilihan Umum Presiden	pemilihan umum presiden yang difasilitasi	wapres	wapres		
			Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	2 hari jadi daerah	0	0%	
			Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Malang	Jumlah dokumen administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	5 dokumen Administrasi	6 dokumen administrasi	120%	
			Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan dan 57 kelurahan	5 kecamatan dan 57 kelurahan	100%	
			Penguatan kelembagaan kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
			Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
			Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/ Kelurahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Peringkat 1 Provinsi Jatim	Peringkat 1 Provinsi Jatim	100%	
			Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Peringkat hasil penilaian sinergitas camat	5 besar terbaik	5 besar terbaik	100%	
			Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Jumlah dokumen rancangan Perda	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	56,10%	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen hasil pevelangan	300 paket	187 paket	59%	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 85,03% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah			
Program	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	1.350.000.000	1.207.813.412	89,47%
Kegiatan	Bimbingan Teknis Legal Drafting	186.000.000	185.957.500	99,98%
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	498.000.000	444.066.282	89,17%
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepekda	400.000.000	370.584.155	92,65%
	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	116.000.000	115.650.000	99,70%
	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	150.000.000	91.555.475	61,04%
	Bimbingan Teknis Legal Drafting	186.000.000	185.957.500	89,47%
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	498.000.000	444.066.282	99,98%
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepekda	400.000.000	370.584.155	89,17%
	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	116.000.000	115.650.000	92,65%
Program	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	3.720.000.000	2.908.536.500	
	Penyuluhan Hukum	900.000.000	733.500.000	78,19%
	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	200.000.000	174.385.000	81,50%
	Digitalisasi Produk Hukum	20.000.000	10.045.000	87,19%
	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	181.000.000	177.650.000	50,23%
	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	79.700.000	69.311.750	98,15%
	Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	146.700.000	138.948.350	86,97%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.072.600.000	818.536.800	94,72%
	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	300.000.000	193.034.600	76,31%
	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	820.000.000	593.125.000	64,34%
Sasaran	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan			72,33%
Program	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	34.970.200.000	34.275.987.000	
Kegiatan	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	4.275.100.000	4.095.280.000	98,01%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	72.715.000	31.815.000	95,79%
	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	100.000.000	98.410.000	43,75%
	Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	82.150.000	77.010.000	98,41%
	Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	59.400.000	58.730.000	93,74%
	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	7.575.000.000	7.241.130.000	98,87%
	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian tempat Ibadah	100.000.000	93.850.000	95,59%
	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	115.000.000	112.440.000	93,85%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	592.590.000	558.396.500	97,77%
	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	20.940.000.000	20.879.460.000	94,23%
	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	375.000.000	362.925.000	99,71%
	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	50.547.500	49.153.000	96,78%
	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	105.000.000	101.290.000	97,24%
	Sosialisasi Wakaf	68.350.000	68.350.000	96,47%
	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	59.072.500	57.572.500	100,00%
	Pembinaan Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	66.950.000	66.030.000	97,46%
	Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	160.730.000	160.700.000	98,63%



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	41.310.000	40.450.000	99,98%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	18.285.000	18.285.000	97,92%
	Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	113.000.000	104.710.000	100,00%
Sasaran	Meningkatnya kualitas manajemen ASN			92,66%
Program	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.355.000.000	1.296.361.036	
Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	236.375.000	234.824.086	95,67%
	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	250.000.000	240.182.574	99,34%
	Workshop Penyusunan SOP dan SP	118.625.000	110.942.000	96,07%
	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	125.000.000	120.827.000	93,52%
	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	70.100.000	66.350.000	96,66%
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	90.000.000	87.117.000	94,65%
	Penyusunan/ Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	240.000.000	234.471.308	96,80%
	Penyusunan/ Reviu Evaluasi Jabatan	224.900.000	201.647.068	97,70%
Sasaran	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja			89,66%
Program	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	739.800.000	644.549.293	
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	599.800.000	516.833.405	87,12%
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	140.000.000	127.715.888	86,17%
Sasaran	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan			91,23%
Program	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	3.930.000.000	3.322.614.588	
Kegiatan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	250.000.000	233.300.200	84,54%
	Penyusunan LKPJ Walikota	700.000.000	683.048.790	93,32%
	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM	35.000.000	23.559.759	97,58%
	Penegasan Batas Wilayah	350.000.000	76.015.041	67,31%
	Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	100.000.000	91.021.920	21,72%
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	50.000.000	40.166.000	91,02%
	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	75.000.000	52.631.200	80,33%
	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	245.000.000	232.792.777	70,17%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	195.000.000	154.084.690	95,02%
	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	210.000.000	204.057.000	79,02%
	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	10.000.000	55.000	97,17%
	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Malang	75.000.000	48.203.940	0,55%
	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	1.065.000.000	965.306.440	64,27%
	Penguatan kelembagaan kecamatan	25.000.000	22.167.500	90,64%
	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	125.000.000	111.847.100	88,67%
	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/ Kelurahan	250.000.000	244.605.431	89,48%
	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	35.000.000	27.194.500	97,84%
	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	135.000.000	112.557.300	77,70%
Program	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	820.000.000	803.982.123	83,38%
Kegiatan	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	52.300.000	52.300.000	98,05%
	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	48.060.000	48.059.479	100,00%
	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	72.800.000	71.135.100	100,00%



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

	Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	161.840.000	161.403.700	97,71%
	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	45.365.000	45.365.000	99,73%
	Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	67.785.000	58.767.300	100,00%
	Pembinaan badan usaha milik daerah	100.000.000	98.751.544	86,70%
	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	50.000.000	46.600.000	98,75%
	Penyusunan Draf Ranperwal PDAM	73.950.000	73.950.000	93,20%
	Penyusunan Draf Ranperwal RPH	73.950.000	73.950.000	100,00%
	Penyusunan Draf Ranperwal BPR	73.950.000	73.700.000	100,00%
	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	52.300.000	52.300.000	99,66%
	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	48.060.000	48.059.479	98,05%
	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	72.800.000	71.135.100	100,00%
	Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	161.840.000	161.403.700	100,00%
	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	45.365.000	45.365.000	97,71%
	Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	67.785.000	58.767.300	99,73%
	Pembinaan badan usaha milik daerah	100.000.000	98.751.544	100,00%
	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	50.000.000	46.600.000	86,70%
	Penyusunan Draf Ranperwal PDAM	73.950.000	73.950.000	98,75%
	Penyusunan Draf Ranperwal RPH	73.950.000	73.950.000	93,20%
	Penyusunan Draf Ranperwal BPR	73.950.000	73.700.000	100,00%
Program	Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	565.000.000	429.762.637	100,00%
Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang SDA	150.000.000	122.871.246	76,06%
	Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	115.000.000	88.407.826	81,91%
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program SDA	150.000.000	111.380.056	76,88%
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur	150.000.000	107.103.509	74,25%
Program	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2.553.345.000	2.015.416.654,24	71,40%
Kegiatan	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	959.400.000	639.497.300	78,93%
	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	959.110.000	804.055.754,24	66,66%
	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	522.000.000	462.816.300	83,83%
	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	112.835.000	109.047.300	88,66%
Program	Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	10.125.000.000	9.983.491.580	96,64%
Kegiatan	Layanan Kehumasan	860.000.000	833.076.220	98,60%
	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	6.675.000.000	6.670.861.800	96,87%
	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	515.000.000	480.467.400	99,94%
	Penerbitan majalah pemerintah kota	560.000.000	513.320.000	93,29%
	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media	1.000.000.000	999.900.000	91,66%
	Layanan Keprotokoleran	515.000.000	485.866.160	99,99%
Sasaran	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah			94,34%
Program	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.319.360.000	3.606.782.877	
Kegiatan	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	2.897.020.000	2.400.147.645	83,50%
	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.422.340.000	1.206.635.232	82,85%
Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475.000.000	450.780.000	84,83%



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	475.000.000	450.780.000	94,90%
		10.067.850.000	8.435.626.998	94,90%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.848.800.000	1.199.547.058	83,79%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	341.340.000	324.422.750	64,88%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	122.400.000	113.083.900	95,04%
	Penyediaan bahan logistik kantor	285.000.000	197.316.250	92,39%
	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	701.100.000	524.702.400	69,23%
	Peringatan/ Kegiatan Insidentil	3.171.660.000	2.837.692.250	74,84%
	Peringatan Hari-hari Besar/ Khusus/Tertentu	3.497.550.000	3.153.088.540	89,47%
	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	100.000.000	85.773.850	90,15%
	Penyediaan jasa surat menyurat	396.100.000	372.154.850	85,77%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	396.100.000	372.154.850	93,95%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.465.356.500	2.083.389.669	93,95%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	382.060.000	361.649.850	84,51%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	302.383.500	260.053.400	94,66%
Program	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.672.266.000	4.304.230.600	86,00%
Kegiatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	801.500.000	718.837.000	92,12%
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	255.731.000	230.838.000	89,69%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.951.550.000	1.926.753.000	90,27%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	145.037.500	90.563.200	98,73%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	82.412.500	71.362.000	62,44%
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	160.790.000	144.880.000	86,59%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	538.000.000	518.460.000	90,11%
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	187.997.000	122.571.900	96,37%
	Pemeliharaan Taman Perkantoran	504.248.000	479.965.500	65,20%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.041.750.000	971.867.825	95,18%
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100.000.000	71.260.875	99,91%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	7.875.648.500	5.006.329.400	92,99%
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	372.400.000	341.023.800	71,26%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.041.795.500	1.034.196.250	95,42%
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	125.200.000	119.746.000	59,47%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.058.425.000	1.006.069.000	91,57%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100.000.000	98.110.000	99,27%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2.695.000.000	341.023.800	95,64%
	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	300.000.000	1.034.196.250	95,05%
	Pengadaan bbm dan pelumas	1.286.078.000	119.746.000	98,11%
Program	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.382.817.000	1.287.486.600	0,21%
Kegiatan	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	1.147.015.000	1.059.066.000	93,11%
	Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	458.302.000	447.475.600	92,33%
	Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	517.780.000	502.275.000	96,87%
	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	2.945.280.000	2.700.067.593	98,45%
	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	250.000.000	225.783.200	98,45%
	Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	250.000.000	155.070.800	95,92%
	Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Administrasi Umum	250.000.000	204.188.234	95,92%



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

	Peningkatan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan	250.000.000	247.818.350	91,20%
	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	250.000.000	248.370.250	90,31%
	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	250.000.000	248.247.500	62,03%
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.150.000.000	1.087.369.259	81,68%
Program	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	1.457.830.000	1.353.417.390	99,13%
Kegiatan	Penyusunan laporan keuangan	70.000.000	53.420.100	92,84%
	Penyusunan laporan keuangan	50.000.000	48.240.000	76,31%
	Penyusunan laporan keuangan	79.600.000	75.309.500	96,48%
	Penyusunan laporan keuangan	40.000.000	40.000.000	94,61%
	Penyusunan laporan keuangan	35.000.000	34.776.590	100,00%
	Penyusunan laporan keuangan	46.655.000	46.655.000	99,36%
	Penyusunan laporan keuangan	45.000.000	37.830.000	100,00%
	Penyusunan laporan keuangan	59.400.000	43.570.000	84,07%
	Penyusunan laporan keuangan	219.475.000	211.224.600	73,35%
	Penyusunan laporan keuangan	60.000.000	59.580.000	96,24%
	Penyusunan LAKIP SKPD	20.000.000	15.255.500	99,30%
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	7.500.000	3.509.900	76,28%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100.000.000	96.275.000	46,80%
	Penyusunan/ Reviu Renstra	75.200.000	74.804.000	96,28%
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	200.000.000	197.027.500	99,47%
	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/ Pelayanan	180.000.000	162.933.000	98,51%
	Penyusunan Renja/RKT	170.000.000	153.006.700	90,52%
	Jumlah	96.718.353.000	86.956.119.975	90,00%



BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran dalam kategori **Berhasil**.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2019.

Malang, 21 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,



Drs. WASTO, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610212 198303 1 025